

Judul : Pengamanan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Berlebihan
Tanggal : Sabtu, 17 Februari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 5

Pengamanan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Berlebihan

Pelibatan ini berdekatan waktunya dengan pengesahan Undang-Undang MD3.

Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah kalangan mengkritik nota kesepahaman ihwal meningkatkan pelibatan Polri dalam pengamanan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat yang diteken oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Kerja sama itu dikhawatirkan bakal membuat polisi dimanfaatkan DPR untuk mempersempit akses masyarakat ke parlemen.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menuturkan, berjaraknya masyarakat dan DPR itu karena nantinya warga tak bakal bebas lagi masuk ke Kompleks Parlemen. "Padahal masyarakat merupakan pemilih anggota DPR yang merupakan wakil rakyat," ujarnya kemarin.

Selain berjarak, Lucius curiga nota kesepahaman ini merupakan cara DPR untuk menuju lembaga *superbody*. Apalagi, menurut dia, penandatanganan nota kesepahaman itu berdekatan dengan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3), yang saat ini sedang menuai protes dari banyak kalangan.

Undang-Undang MD3 memiliki sejumlah pasal yang dianggap bakal



Suasana Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang di Komplek Parlemen, Jakarta, 14 Februari lalu.

menyebabkan DPR menjadi lembaga *superbody* dan antikritik. Misalnya, dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa DPR bisa menggunakan kepolisian untuk memanggil paksa siapa pun yang tidak hadir tiga kali berturut-turut ketika dipanggil oleh alat kelengkapan Dewan. Selain itu, pada Pasal 122, disebutkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bisa mengambil langkah hukum terhadap orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota

DPR. "Nota kesepahaman dan Undang-Undang MD3 ini terkesan saling melengkapi untuk melindungi kepentingan DPR," ujarnya.

Direktur Komite Pemanfaatan Legislatif, Syamsuddin Alimsyah, mengatakan, melalui nota kesepahaman itu, polisi juga berpotensi dimanfaatkan untuk menghalangi penegak hukum lain, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menyidik atau menggeledah ruangan anggota DPR. "Nanti, Polri harus tahu terlebih dahulu apa yang bakal penyidik KPK

lakukan di DPR," ujarnya.

Kerja sama peningkatan keamanan Kompleks DPR oleh Polri ini merupakan kelanjutan wacana pembentukan polisi parlemen pada 2015. Ketika itu, DPR meminta Polri menaruh 1.194 personel yang dipimpin oleh brigadir jenderal untuk mengamankan Kompleks DPR. Kala itu, rencana tersebut batal karena menuai kritik dari masyarakat.

Bambang membantah anggapan bahwa peningkatan keamanan DPR oleh Polri itu akan membuat parlemen berjarak

dengan masyarakat. "Ini hanya untuk menghindari ancaman yang tak pernah diprediksi. Hubungan DPR dan masyarakat masih bebas," ujarnya.

Adapun Tito mengatakan peningkatan pengamanan ini dilakukan karena beberapa serangan sempat terjadi di DPR, seperti ledakan bom pada 2003. Selain itu, menurut dia, pengamanan ini mencontoh hal serupa di Amerika Serikat. "Pengamanan ini tentu jangan menjaga jarak antara wakil rakyat dan rakyatnya," ujarnya.

● CHITRA P

Lima Kompi Polisi Penjaga Parlemen

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian bakal menerjunkan anak buahnya untuk menjaga keamanan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta. Pelibatan Polri ini merupakan hasil penekanan nota kesepahaman antara Tito dan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Sedikitnya 500 polisi atau setara dengan lima kompi pasukan di bawah kendali seorang jenderal polisi bintang dua bakal ditugaskan di DPR:

500 orang, yang terdiri atas:

Inspektur Jenderal
1 orang

Brigadir Jenderal
1 orang

Komisaris Besar
4 orang

Ajun Komisaris Besar
10 orang

Komisaris
20 orang

Ajun Komisaris
22 orang

Inspektur
52 orang

Brigadir
390 orang

Tugas:

- Menjaga setiap pintu masuk di Kompleks Parlemen.
- Mengurus administrasi siapa saja warga yang berkunjung ke Kompleks Parlemen.

● HUSSEIN ABRİ DONGORAN | SUMBER: DOKUMEN SEKJEN DPR | WANANCARA